

FORM IKK LPPD PROVINSI SULAWESI SELATAN AKHIR TA 2021
SESUAI PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

NO	IKK OUTCOME	RUMUS		CAPAIAN IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT	KET.
	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Perikanan Tangkap = 417.410,7 ton Perikanan budidaya = 4.081.480,5 ton	4.498.891,2 ton	1)	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	Jumlah WPP yang telah melaksanakan upaya pengelolaan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan	1 (713) WPP	Jumlah Produksi Perikanan masih berupa data sementara karena belum ada Validasi Nasional. Validasi akan diadakan pada bulan April 2022
					2)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Provinsi per tahun	407	
					3)	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar oprasinoal 10 x100% 22 jumlah seluruh pelabuhan perikanan Standar operasional antara lain : 1) Telah operasional 2) Penetapan kelas oleh MKP 3) Memiliki kelembagaan 4) Memiliki syahbandar di pelabuhan perikanan atau petugas kesyahbandaran 5) Menyusun WKOPP 6) Menerapkan CPIB	45,45 %	Salah satu faktor penghambat adalah beberapa pelabuhan belum memiliki penetapan kelas yaitu hanya 2 Pelabuhan yang sudah Penetapan Kelas dan saat ini masih dalam proses pengusulan penetapan kelas, juga terbatasnya SDM untuk penetapan kelembagaan sesuai Pergub nomor 67 Tahun 2020
					4)	Jumlah izin \pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	SIPI = 2.190 Unit Kapal SIKPI = 180 Unit Kapal BPKP = 450 Unit Kapal Ket : SIPI : 10 - 30 GT BPKP : >5 - 10 GT	
					5)	Jumlah kapal yang+G12 terdaftar	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun	3.227 Unit Kapal	
					6)	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang diterbitkan per tahun	17 izin usaha yang diterbitkan	

NO	IKK OUTCOME	RUMUS		CAPAIAN IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT	KET.
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{ci}{si} \right) . 100\%$	ci = 228	63.87	1)	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundan yang berlaku 525,010 X 100% 9.439.985 luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki	0.056	Masih minimnya ketaatan dan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan, termasuk surat pencatatan atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).
					2)	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Jumlah Kawasan Konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil yang dikelola secara efektif $\frac{2}{7} \times 100\%$ keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki	28.57	
					3)	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	357	
					4)	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya	17	
					5)	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	145	

NO	IKK OUTCOME	RUMUS		CAPAIAN IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT	KET.
					6)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluair minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluair minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	19	
					7)	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	54 Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawasan)	
					8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	145 izin usaha yang diterbitkan	

Makassar, 12 Agustus 2022
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan



Dr. M. ILYAS, ST., M.S.Sc
Nip. 19700606 199603 1 006